

BA.005.01

Pengadilan Agama Penajam

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019
(401877)



Jln. Provinsi KM. 08, Komplek Islamic Centre, Kelurahan Nipah –
Nipah, Kecamatan Penajam. Penajam Paser Utara.

Kalimantan Timur

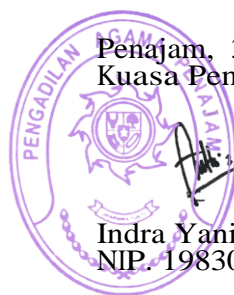
KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Penajam adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Penajam mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Penajam. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Penajam, 30 Juni 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,

Indra Yanita Yuliana, S.E.,MSI.
NIP. 19830104 2006 1 005

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	22
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	27
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	31
F. Pengungkapan Penting Lainnya	32



PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Jalan. Provinsi KM.08 Komplek Islamic Centre. Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan

Penajam . Telp (0542) 8541119

Email : pa-penajam@pta-samarinda.net

Website : www.pa-penajam.net

PENAJAM PASER UTARA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Penajam yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penajam, 30 Juni 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,



Indra Yanita Yuliana, S.E.,MSI.
NIP. 19830104 2006 1 005

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Penajam TA. 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2020.

Realisasi Pendapatan Negara per 30 Juni 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara TA. 2020 adalah sebesar Rp2.435.462.411,00 atau mencapai 84,15 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2.894.028.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp12.143.760.891,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.779.300,00, Aset Tetap (neto) sebesar Rp12.140.540.159,00, Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.441.432,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp12.143.760.891,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode TA. 2019 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp185.800,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(245.300,00). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp0,00 dan surplus/defisit sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami

Defisit-LO sebesar Rp(2.988.520.025,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas per 31 Desember tahun pelaporan dibandingkan dengan per 31 Desember tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp12.485.395.845,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(2.988.520.025,00) kemudian ditambah dengan selisih revaluasi aset tetap senilai Rp(0,00) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2.646.885.071,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp12.143.760.891,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode 31 Desember 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA PENAJAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN TA. 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA. 2020		% thd Angg	TA. 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	0.00	3,730,440
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	0.00	3,730,440
BELANJA					
Belanja Operasi	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	2,172,518,000	1,179,991,956	54.31	756,752,528
Belanja Barang Operasional	B.4	773,207,000	305,775,369	55.20	206,321,494
Belanja Barang Non Operasional		130,000,000	129,100,000	99.94	299,808,000
Jumlah Belanja Operasi		3,075,725,000	1,614,867,325	84.67	1,262,882,022
Belanja Modal					
Belanja Tanah		-	-	0.00	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.5	-	-	0.00	-
Belanja Gedung dan Bangunan		-	-	0.00	-
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan		-	-	0.00	-
Belanja Modal lainnya		-	-	0.00	-
Jumlah Belanja Operasi		-	-	0.00	-
JUMLAH BELANJA		0	0	0.00	0

PENGADILAN AGAMA PENAJAM
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 30 JUNI TA. 2020
DAN TA. 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA. 2020	TA. 2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas		-	-
Piutang PNB		-	-
Bagian Lancar TP/TGR		-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek		-	-
Belanja Dibayar di Muka		-	-
Persediaan		20,356,500	2,045,000
Jumlah Aset Lancar	C.2	20,356,500	2,045,000
		20,356,500	2,045,000
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR		-	-
Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang		-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
		-	-
ASET TETAP			
Tanah		1,014,787,690	885,687,690
Peralatan dan Mesin	C.3	-	-
Gedung dan Bangunan	C.4	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.5	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.6	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.7	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		-	-
Jumlah Aset Tetap	C.8	(266,249,819)	(168,539,588)
		748,537,871	717,148,102
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud		-	-
Aset Lain-Lain		-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya		-	-
Jumlah Aset Lainnya		(2,402,387)	(1,441,432)
JUMLAH ASET		785,894,371	719,193,102
KEWAJIBAN		17,000,000	2,567,366
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN		-	-
	C.9	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.10	0	2,567,366
Pendapatan Diterima di Muka		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		17,000,000	2,567,366
JUMLAH KEWAJIBAN		17,000,000	2,567,366
EKUITAS			
Ekuitas	C.11	768,894,371	716,625,736
JUMLAH EKUITAS		768,894,371	716,625,736
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		785,894,371	719,193,102

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA PENAJAM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TA. 2020 DAN TA. 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA. 2020	TA. 2019
EKUITAS AWAL	E.1	13,699,488,744	13,699,488,744
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(3,257,517,707)	(3,257,517,707)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATID PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	(702,501,728)	(702,501,728)
PENYESUAIAN NILAI ASET		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		(702,501,728)	(702,501,728)
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI		-	-
KOREKSI LAIN-LAIN		-	-
Jumlah Lain-Lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	2,745,926,536	2,745,926,536
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(1,214,092,899)	(1,214,092,899)
EKUITAS AKHIR	E.5	12,485,395,845	12,485,395,845

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA PENAJAM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TA. 2019 DAN TA. 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA. 2020	TA. 2020
EKUITAS AWAL	E.1	12,485,395,845	13,699,488,744
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(3,008,780,749)	(3,257,517,707)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATID PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	(702,501,728.00)
PENYESUAIAN NILAI ASET		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		-	(702,501,728.00)
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI		-	-
KOREKSI LAIN-LAIN		-	-
Jumlah Lain-Lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	2,646,885,071	2,745,926,536
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(361,895,678)	(1,214,092,899)
EKUITAS AKHIR	E.5	12,123,500,167	12,485,395,845

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Penajam

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Tahun 2019 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Agama Penajam pada tahun 2014 sampai dengan 2019 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Penajam sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Agama Penajam adalah

“Terwujudnya Pengadilan Agama Penajam Yang Agung”.

Misi Pengadilan Agama Penajam adalah

1. Membuka Akses Masyarakat Terhadap Pengadilan Agama
2. Mewujudkan Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan
3. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan dan Transparan
4. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen Peradilan yang Akuntabel
5. Mengupayakan Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Standar Ketentuan yang Berlaku

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Penajam

melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan menjangkau badan peradilan;
3. Terwujudnya kepercayaan masyarakat yang berorientasi pada butir 1 dan 2.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan terbaru Nomor 222/PMK.05/2017 tanggal 30 Desember 2017 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga merupakan penyempurnaan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 maka laporan keuangan pada satuan kerja Pengadilan Agama Penajam didasarkan pada peraturan tersebut sehingga dapat menuangkan pelaporan yang transparansi dan akuntabel.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

Laporan Keuangan TA. 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Penajam. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Basis
Akuntansi

Pengadilan Agama Penajam menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian

Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar
Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Penajam dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan
Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA. 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Penajam. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Penajam

adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-
LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada

tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk Pemeliharaan gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan
Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan

setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

Piutang
Jangka
Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian

Negara/daerah.

- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	1 0
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	2 0
Hak Cipta Karya Seni Terapan,	2 5

Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	5 0
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	7 0

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

□ Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

□ Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- Tanah
- Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

Implementasi
Akuntansi Berbasis
Akrual Pertama Kali

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Negara Rp0,00

Realisasi Pendapatan untuk Tahun 2020 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00 persen karena pada tahun 2019 Tidak adanya pendapatan persekot/uang muka gaji dan Tidak adanya pendapatan kembali belanja pegawai tahun anggaran lalu;

B.2. Belanja

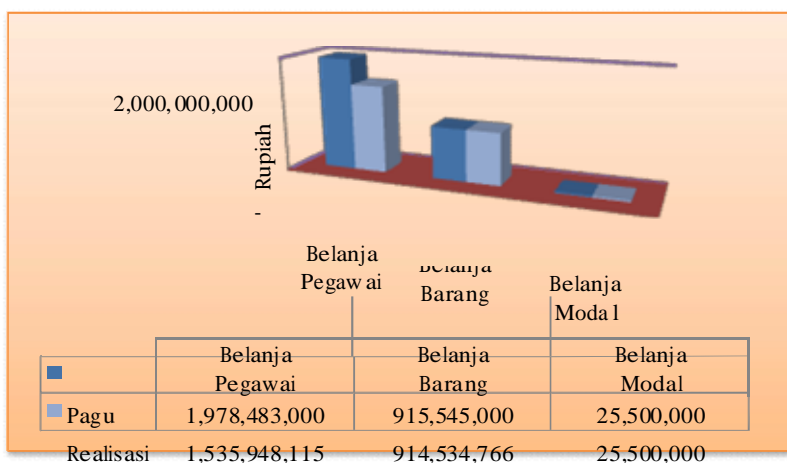
Realisasi Belanja TA 2020 adalah sebesar Rp2.475.982.881,00 atau 84,81% dari anggaran belanja sebesar Rp2.919.528.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Realisasi Belanja
Negara
Rp2.475.982.881,
00

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA. 2020

Uraian	TA. 2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	1,978,483,000	1,535,948,115	77.63
Belanja Barang	915,545,000	914,534,766	99.89
Belanja Modal	25,500,000	25,500,000	100.00
Total Belanja Kotor	2,919,528,000	2,475,982,881	84.81
Pengembalian Belanja	-	-	0.00
Jumlah	2,919,528,000	2,475,982,881	84.81

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan Laporan TA. 2019, Realisasi Belanja TA. 2020 mengalami kenaikan sebesar 12,48% dikarenakan Realisasi Belanja Pegawai TA. 2020 lebih kecil sebesar Rp1,535,948,115,00

dibandingkan dengan Realisasi Belanja Barang Pegawai TA. 2019 sebesar Rp1,815,961,162,00. Pada TA. 2020 Untuk Belanja Pegawai terdapat kenaikan sebesar 8,99% namun jumlah pegawai di Kantor Pengadilan Agama Penajam mengalami penurunan karena mendapatkan promosi mutasi ke daerah lain sehingga Anggaran yang ada tidak dapat terserap secara maksimal.

Perbandingan Realisasi Belanja TA. 2020 dan TA. 2019

URAIAN	Anggaran	REALISASI TA. 2020	% real.Angg.	Anggaran	REALISASI TA. 2019	% real.Angg.	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1,978,483,000	1,535,948,115	77.63	1,889,559,000	1,815,961,162	96.11	(18.47)
Belanja Barang	915,545,000	914,534,766	99.89	895,553,000	892,465,374	99.66	0.23
Belanja Modal	25,500,000	25,500,000	100.00	37,500,000	37,500,000	100.00	-
Jumlah	2,919,528,000	2,475,982,881	84.81	2,822,612,000	2,745,926,536	97.28	(12.48)

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA. 2020 dan TA. 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.535.948.115,00 dan Rp1.815.961.162,00. Realisasi belanja pegawai TA. 2020 mengalami kenaikan sebesar 18,47% dari laporan TA. 2019. Hal ini disebabkan Karena realisasi anggaran belanja pegawai TA. 2020 lebih tinggi sebesar 77,63% dibandingkan dengan periode TA. 2019 sebesar 96,11%. Pada Tahun 2020 terdapat penambahan pegawai (mutasi) namun anggaran yang disediakan tetap sebagaimana tahun 2019, selain itu pada tahun 2019 terdapat pengembalian belanja pegawai sebesar Rp.1.179.530, hal tersebut karena terdapat pegawai yang mendapat promosi jabatan dari pengadministrasi umum menjadi kepala sub bagian dan pengembalian belanja uang makan PNS karena terdapat kelebihan perhitungan.

Belanja
Pegawai
Rp1.535.948.11
5,00

Perbandingan Belanja Pegawai TA. 2020 dan TA. 2019

URAIAN	Anggaran	REALISASI TA. 2020	% Real. Angg.	Anggaran	REALISASI TA. 2019	% Real. Angg.	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1,978,483,000	1,535,948,115	77.63	1,889,559,000	1,815,961,162	96.11	(18.47)
Belanja Lembur	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1,978,483,000	1,535,948,115	77.63	1,889,559,000	1,815,961,162	96.11	(18.47)
Pengembalian Belanja Pegawai	-	1,179,530	-	-	305,347	-	-
Jumlah Belanja	1,978,483,000	1,537,127,645	77.69	1,889,559,000	1,816,266,509	96.12	(18.43)

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA. 2020 dan TA. 2019 adalah masing-masing sebesar Rp914.534.766,00 dan Rp892.465.374,00. Realisasi Belanja Barang TA. 2020 mengalami peningkatan 10,71% dari Realisasi Belanja Barang TA. 2019. Hal ini antara lain disebabkan untuk TA. 2020 terdapat penambahan anggaran untuk belanja barang dan dapat terserap dengan maksimal yaitu 99.89%.

Perbandingan Belanja Barang TA. 2020 dan TA. 2019

Belanja Barang
Rp914.534.766.,00

URAIAN	Anggaran	REALISASITA. 2020	% Real. Angg.	Anggaran	REALISASI TA. 2019	% Real. Angg.	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	429,817,000	437,045,463	101.68	375,500,000	374,530,870	99.74	1.94
Belanja Jasa	97,512,000	95,969,383	98.42	73,541,000	71,908,224	97.78	0.64
Belanja Pemeliharaan	171,156,000	164,515,920	96.12	189,292,000	189,273,280	99.99	(3.87)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	217,060,000	217,004,000	99.97	257,220,000	256,753,000	99.82	0.16
Jumlah Belanja Kotor	915,545,000	914,534,766	99.89	895,553,000	892,465,374	99.66	0.23
Pengembalian Belanja	-	1,179,530	-	-	305,347	-	-
Jumlah Belanja	915,545,000	914,534,766	99.89	895,553,000	892,465,374	99.66	0.23

B.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp25.500.000,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2020 dan TA. 2019 adalah masing-masing sebesar Rp25.500.000,00, dan Rp37.500.000,00. Pada tahun ini masih dapat mempertahankan prosentase tahun sebelumnya yaitu sebesar 100 persen bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2019. Hal ini di karenakan belanja modal yang di fokuskan pada penambahan peralatan dan mesin berupa pengadaan Lap Top sebagai upaya penunjang operasioanal kantor dapat terealisasikan pada pelaporan TA. 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA. 2020 dan TA. 2019

URAIAN	REALISASI TA. 2020	REALISASI TA. 2019	NAIK (TURUN) %
Pengadaan PC, Laptop, Printer, Router dan Scaner	25,500,000	37,500,000.00	100%
Teknologi Informasi	0	-	0%
Anti Virus	0	-	0%
Pengadaan AC	0	-	0%
Jumlah Belanja Kotor	25,500,000	37,500,000.00	0%
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	25,500,000	37,500,000.00	100.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00

Saldo Kas di bendahara Pengeluaran TA. 2020 dan TA. 2019 adalah masing masing sebesar Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang telah di pertanggung jawabkan per tanggal neraca.

Rincian Kas Bendahara Pengeluaran Sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	TA. 2020	TA. 2019
Bank BRI No. Rek. 062701000177300	-	-
Uang Tunai	-	-
Kwitansi UP	-	-
Jumlah	-	-

C.2 Persediaan

Persediaan
Rp1.779.300,00

Nilai Persediaan per TA. 2020 dan TA 2019 dalam laporan ini. masing-masing adalah sebesar Rp1.779.300,00 dan Rp2.792.000,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan TA. 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	TA. 2020	TA. 2019
Barang Konsumsi	1,779,300	2,792,000
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	1,779,300	2,792,000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.3 Tanah

Saldo aset tetap berupa Tanah TA. 2020 adalah Rp.300.000.000,00.

Tidak ada perubahan nilai Tanah.

Tanah
Rp300.000.000,0
0

Saldo Nilai Perolehan TA 2020	300,000,000
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	
Saldo TA. 2019	300,000,000
Akumulasi Penyusutan TA. 2019	-
Nilai Buku TA. 2019	300,000,000

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin TA. 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing Rp1.970.148.440,00 dan Rp1.773.746.250,00

Tidak ada perubahan nilai Peralatan dan Mesin. Nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Peralatan dan
Mesin
Rp1.970.148.440
,00

Saldo Nilai Perolehan TA 2018	1,773,746,250
Mutasi masuk:	170,902,190.00
Pembelian	25,500,000
Hibah Barang	-
Mutasi kurang:	-
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo TA. 2019	1,970,148,440
Akumulasi Penyusutan TA. 2019	(1,504,482,633)
Nilai Buku TA. 2019	465,665,807

Mutasi tambahan berupa :

a. Penambahan peralatan dan mesin dari pembelian berupa :

NO	Perolehan	TA. 2019
1	Laptop	25,500,000
2	Komputer PC	48,749,600
3	Ventouch Interactive Android	17,840,000
4	Indo Rack	9,866,590
5	UPS	10,136,000
6	Server	84,310,000
7	AC Split	-
	Jumlah	196,402,190

Gedung dan
Bangunan
Rp11.783.099,00

C.5 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan TA. 2020 dan TA. 2019 masih sama nilainya yaitu sebesar Rp11.783.099.000,00. Karena terdapat Revaluasi aset dan hingga tahun 2019 masih dalam proses penilaian oleh KPKNL dan BPK. Nilai terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan TA.2019	11,783,099,000
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	
Koreksi Nilai Revaluasi	
Saldo TA. 2019	11,783,099,000
Akumulasi Penyusutan TA. 2019	(504,168,628)
Nilai Buku TA. 2019	11,278,930,372

Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp100.941.000,00

C.6 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA. 2020 dan TA 2019 masih tetap yaitu senilai Rp100.941.000,00. Nilai terhadap aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan TA. 2020	100,941,000
Mutasi tambah:	
Koreksi Nilai Revaluasi	
Mutasi kurang:	-
Saldo TA. 2019	100,941,000
Akumulasi Penyusutan TA. 2019	(5,383,520)
Nilai Buku TA. 2019	95,557,480

C.7 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp386.500.00.

Saldo Aset Tetap Lainnya TA. 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing Rp386.500,00 dan Rp0,00. Rincian Akumulasi Penyusutan TA. 2019 adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan TA. 2020	386,500
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo TA. 2019	386,500
Akumulasi Penyusutan TA. 2019	-
Nilai Buku TA. 2019	386,500

C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp(2.016.437.168,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA. 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing Rp. (2.016.437.168,00) dan Rp. (1.468.093.592,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontrak akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap Gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA. 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai BMN	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1,970,148,440	1,504,482,633	465,665,807
2	Gedung dan Bangunan	11,783,099,000	504,168,628	11,278,930,372
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	100,941,000	5,383,520	95,557,480
4	Softwere	3,843,819	2,402,387	1,441,432
	Akumulasi Penyusutan	13,858,032,259	2,016,437,168	11,841,595,091

Utang Kepada Pihak
Ketiga
Rp20.260.724,00

C.9 Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga TA. 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp20.260.724,00 dan Rp11.319.132.000,00. Utang Kepada Pihak Ketiga dimaksud yaitu Langganan Air, Langganan Telepon, Langganan Internet, Langganan Listrik dan Langganan Surat Kabar (Koran).

Ekuitas
Rp12.772.866.253,00

C.11 Ekuitas

Ekuitas TA. 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp12.772.866.253,00 dan Rp Rp13.699.488.744,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp0,00

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 karena tidak terdapat penerimaan negara bukan pajak karena mulai tahun 2018 sudah tidak terdapat pendapatan dari persekot gaji. Pendapatan tersebut terdiri dari:

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp1.537.127.645,00

Jumlah Beban Pegawai TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.537.127.645,00 dan Rp1.816.266.509,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2020 dan TA 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	1,537,127,645	1,816,266,509	(15.37)
Beban Tunjangan-Tunjangan	-	-	-
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	-	-	-
Jumlah	1,537,127,645	1,816,266,509	(15.37)

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp29.599.000,00

Jumlah Beban Persediaan TA 2020 dan dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp29.599.000,00 dan Rp30.876.000,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk laporan TA 2020 dan dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2020 dan TA 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	29,599,000	30,876,500	(4.14)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	29,599,000	30,876,500	(4)

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa
Rp502.415.846,00

Jumlah Beban barang dan Jasa TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp502.415.846,00 dan Rp399.793.594,00. Beban barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa TA 2020 dan TA 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban keperluan perkantoran	330,634,838	267,364,370	23.66
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,864,500	2,520,000	13.67
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	44,100,000	47,520,000	(7.20)
Beban Barang Operasional Lainnya	28,847,125	10,481,000	175.23
Beban Sewa	18,000,000	0	100
Beban Langganan Listrik	67,342,801	63,196,770	6.56
Beban Langganan Telepon	7,757,977	6,965,426	11.38
Beban Langganan Air	2,868,605	1,746,028	64.29
Jumlah	502,415,846	399,793,594	25.67

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp63.229.080,00

Beban Pemeliharaan TA 2020 dan dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp63.229.080,00 dan Rp41.961.000,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk per 31 Desember 2019 dan dan per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2020 dan TA 2019

URAIAN JENIS BEBAN	per 30 Juni 2020	per 30 Juni 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	38,138,400	16,422,000	132.24
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25,090,680	25,539,000	(1.76)
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	0	-
Jumlah	63,229,080	41,961,000	50.69

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas
Rp 217.004.000,00

Beban Perjalanan Dinas TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp217.004.000,00 dan Rp256.753.000,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2020 dan TA 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	214,304,000	256,003,000	- 16.29
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,700,000	750,000	260.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
Jumlah	217,004,000	256,753,000	- 15.48

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp2.016.437.168,0
0

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.016.437.168,00 dan Rp261.911.466,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2020 dan TA 2019

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,504,482,633	1,207,553,686	24.59
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	504,168,628	256,406,714	96.63
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	5,383,520	2,691,760	100.00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	2,014,034,781	1,466,652,160	37.32
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	2,402,387	1,441,432	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,016,437,168	1,468,093,592	37.35

D.8 Kegiatan Non Operasional

Surplus /Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional Rp0,00

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Tidak ada Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2020 dan TA 2019 karena tidak terdapat kegiatan non operasionnal yang menghasilkan pendapatan dan beban.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp12.123.500.167,
00

Nilai ekuitas pada TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp12.123.500.167,00 dan Rp12.485.395.845,00.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
Rp(1.519.162.770,0
0)

Jumlah Defisit TA 2019 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(1.519.162.770,00) dan Rp(1.401.593.618,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Koreksi Yang
Menambah/Mengur
angi Ekuitas Yang
Antara Lain Berasal
Dari Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Rp(702.501.728,00)

Jumlah Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp(702.501.728,00) dan Rp0,00. Nilai tersebut dihasilkan dari adanya Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp(702.501.728,00).

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
Rp(1.295.042.007)

Nilai Transaksi Antar Entitas Per 31 Desember 2020 dan per 30 Juni adalah masing-masing sebesar Rp1.295.042.007,00 dan Rp1.155.524.652,00.

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp12.772.866.253,
00

Nilai Ekuitas Per 31 Juni 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp12.772.866.253,00 dan Rp13.833.844.714,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca pada laporan ini.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 55/PA/SK/XII/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya mengangkat Indra Yanita Yuliana, SE., M.Si Jabatan Sekretaris Pengadilan Agama Penajam sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2019. Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Penajam Nomor W17-A11/782/KU.01/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor W17-A10/780/KU.1/12/2020 tanggal 31 April 2020 Tentang Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM dan Staf Pengelola Keuangan. Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Penajam Nomor W17-A10/129/KU.00.1/1/2019 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran.

Kuasa Pengguna Anggaran : Indra Yanita Yuliana, SE.M.Si.

Pejabat Pembuat Komitmen: Indra Yanita Yuliana, SE.M.Si.

Pejabat Penandatanganan SPM : Hijrachman, S.Psi.

Bendahara Pengeluaran : Akhmad Baihaqi, S.H.

Staf Pengelola Keuangan :

Abdul Rahman Sidiq sebagai Bendahara Penerimaan.

Iqbal Khairillah, Anggota

